

LAPORAN NOTULA

Pendalaman Usulan Proposal CSO Demokrasi – Perludem dan TI Indonesia

Kamis, 22 September 2022 | Pukul 10.00 – 12.30

PENDAHULUAN

Sekretariat Open Government Indonesia melaksanakan pendalaman usulan proposal yang diajukan oleh Perludem dan Transparency International Indonesia terkait dengan Tata Kelola Data Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Transparansi dan Akuntabilitas Dana Bantuan Partai Politik.

TUJUAN

1. Kesesuaian Usulan Komitmen dengan Perencanaan pada Direktorat Bappenas Terkait
2. Kesesuaian Usulan Komitmen dari CSO dengan Rencana Kerja pada K/L terkait

PEMBAHASAN

1. **Theodorus** dari Sekretariat Open Government Indonesia memberikan pengantar pertemuan terkait dengan pendalaman proposal usulan CSO Media Link:
 - a. Sekretariat Open Government Indonesia, bertugas untuk menyusun serta mengawal pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia. RAN OGI sendiri sudah berjalan sejak tahun 2011, sampai dengan tahun 2022, Indonesia sudah mengeluarkan enam Rencana Aksi Nasional, serta sedang menyusun Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia VII Periode 2023-2024.
 - b. Dalam Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia VII, Sekretariat OGI telah memetakan enam isu strategis. Adapun isu strategis yang menjadi pembahasan pada rapat ini adalah Pelayanan Publik yang Inklusif.
2. **Bapak Dhika** dari Perludem memberikan pengantar terkait dengan usulan proposal yang diajukan oleh Perludem, yaitu.
 - a. Aksi keterbukaan data pemilu merupakan aksi lanjutan yang telah didorong oleh Perludem sejak tahun 2018. Untuk aksi pada tahun 2023-2024, Perludem telah mengaji dan memetakan beberapa data yang merupakan prioritas untuk didorong, adapun terkait data tersebut telah disediakan dalam kajian yang dilakukan oleh Perludem serta telah diadvokasikan kepada KPU. Harapannya data-data tersebut dapat menjadi prioritas dalam perencanaan kerja di KPU.
3. **Bapak Wariki Sutikno** selaku Direktur Politik dan Komunikasi Kementerian PPN / Bappenas memberikan pengantar terkait dengan usulan aksi yang diajukan oleh Perludem:
 - a. Pelaksanaan perbaikan tata kelola data harus didorong oleh masyarakat sipil. Ide ini sangat baik, walaupun pada praktiknya kita mengalami kesulitan karena berikaitan dengan sulitnya alur birokrasi yang membuat praktik maupun ide yang berupa terobosan menjadi sulit untuk diwujudkan.
4. **Bapak Indrajaya** dari Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas memberikan tanggapan terkait dengan masukan yang diajukan oleh Perludem:
 - a. Dorongan terkait keterbukaan merupakan hal yang penting dan perlu didorong oleh masyarakat sipil. Terkait dengan keterbukaan data, rekan-

rekan Perludem diharapkan memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- b. Terdapat beberapa catatan baik yang sudah dilaksanakan oleh KPU dalam mendorong keterbukaan informasi. Namun tantangan pada tingkat pimpinan terkait prioritas data menjadi suatu hal tersendiri. Fokus terkait dengan data sebenarnya sudah coba didorong oleh KPU untuk memastikan keterbukaan data dalam Pemilihan Umum. Polkom mendukung terkait dengan hal tersebut.
5. **Ibu Maharani** dari Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi sekaligus Point of Contact Open Government Indonesia memberikan tanggapan atas Komitmen dari Dit. Polkom dan Perludem:
- a. Usulan CSO tidak bertujuan untuk mengubah rencana kerja yang telah dilakukan oleh direktorat sektor Bappenas dengan Kementerian / Lembaga terkait. Usulan proposal yang dilakukan oleh rekan-rekan CSO bertujuan untuk menguatkan peran implementasi yang dilakukan oleh Kementerian / Lembaga dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil.
 - b. Rekan-rekan Perludem memiliki usulan komitmen dalam hal mendorong kelengkapan data dan informasi yang telah tersedia dalam portal Open Data KPU. Terdapat beberapa data yang belum terintegrasi dalam portal tersebut, serta belum tersedianya seluruh data dalam format Open Data. Singkatnya terdapat tiga hal yang ingin didorong oleh Perludem, yaitu: Kualitas Data, Kelengkapan Data, dan Integrasi Data.
6. **Bapak Indrajaya** memberikan tanggapan terhadap penjelasan yang diberikan oleh Ibu Maharani sebagai berikut:
- a. Sepakat dengan usulan-usulan tersebut. Polkom berkomitmen untuk membantu dan juga mendesak KPU agar perhatian terhadap kualitas, kelengkapan, dan integrasi data bisa segera dipenuhi, tidak hanya fokus pada tahapan pelaksanaan Pemilu. Namun, perlu melakukan pendekatan yang tepat agar tidak memberatkan rekan-rekan KPU karena rumit dan padatnya tahap pelaksanaan Pemilu yang serentak untuk tahun 2024.
7. **Bapak Dhika** dari Perludem menyampaikan tanggapan:
- a. Perludem dengan KPU telah membangun komunikasi dan juga relasi untuk mendorong keterbukaan data terkait pemilihan umum. Komitmen kepemimpinan komisioner yang sekarang, tetapi memang belum menjadi prioritas terkait dengan tata kelola data. Namun harapannya kedepan dapat segera menjadi prioritas bagi KPU terkait tata kelola data.
8. **Bapak Alvin Nicola** dari Transparency International memamparkan terkait dengan usulan Transparency International Indonesia untuk RAN OGI 2023-2024 sebagai berikut:
- a. Transparency International Indonesia mendorong adanya keterbukaan dan akuntabilitas bagi partai politik yang menerima dana bantuan partai politik. Hal tersebut dapat dilakukan melalui: (1) standardisasi kebijakan akuntansi untuk pelaporan keuangan partai politik; (2) penguatan dimensi akuntabilitas dalam PP 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik; (3) memperkuat implementasi publikasi laporan keuangan partai politik melalui perbaikan PERKI SLIP dan dipublikasikan dalam portal KamuBersihAkuPilih.id; dan (5) pemanfaatan dan integrasi LHKPN calon anggota legislatif 2024 dengan SIPOL.

9. **Bapak Wariki** selaku Direktur Politik dan Komunikasi Kementerian PPN / Bappenas menanggapi masukan dari TII sebagai berikut:
- a. Penanganan biaya politik di Indonesia merupakan suatu hal yang fundamental dan perlu menjadi perhatian. Biaya politik di Indonesia dinilai terlalu tinggi, menyebabkan perlu penanganan secara khusus mengenai bantuan bagi partai politik, karena apabila tidak hal tersebut dapat menyebabkan biaya politik yang tinggi serta tingginya potensi terjadi korupsi.
 - b. Perhatian terhadap perubahan sistem politik di Indonesia saat ini masih kecil. Pada beberapa kesempatan, Bapak Wariki juga turut mendorong terkait inisiatif perbaikan tata kelola bantuan keuangan bagi partai politik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan awareness masyarakat maupun elite pengambil keputusan untuk memberikan perhatian terhadap perubahan sistem bantuan keuangan partai politik di Indonesia.
 - c. Telah dilaksanakan kunjungan kepada BPK, yang menemukan bahwa ada keterbatasan kewenangan BPK dalam melakukan audit keuangan partai politik, yaitu hanya berhak mengaudit dana yang diperoleh dari negara. Idealnya yang dapat mengaudit dana non-APBN adalah akuntan publik. Namun akuntan publik di Indonesia masih dapat diatur oleh partai politik. Oleh sebab itu, idealnya perlu dilakukan revisi UU, karena Partai Politik belum masuk kategori Badan Publik.
10. **Bapak Indrajaya** dari Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN / Bappenas memberikan tanggapan terkait masukan TII sebagai berikut:
- a. Kewenangan untuk mendorong partai politik meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya menjadi tantangan tersendiri. Hal tersebut dikarenakan partai politik tidak berada di bawah kontrol Bappenas. Sehingga membutuhkan usaha dan strategi komunikasi yang khusus untuk memastikan isu terkait bantuan keuangan partai politik dapat semakin baik.
11. **Bapak Eldi** dari Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN / Bappenas memberikan tambahan terkait tanggapan Bapak Indrajaya sebagai berikut:
- a. Bantuan Keuangan Partai Politik dapat menambahkan stakeholders BPK. Terkait akuntabilitas bantuan keuangan partai politik selama ini hanya pelaporan kepada BPK tidak ada opini maupun bentuk-bentuk tindak lanjut lain yang dilakukan oleh BPK. Hal tersebut membatasi pergerakan BPK ketika ingin menindaklanjuti masalah bantuan keuangan partai politik.

KESIMPULAN

Usulan Perludem dan Transparency International Indonesia merupakan usulan-usulan menarik yang dapat didorong oleh platform Open Government Indonesia. Namun adanya beberapa keterbatasan kewenangan serta tanggung jawab dari lembaga yang menjadi target pelaksana. Oleh sebab itu diperlukan pelaksanaan diskusi lanjutan untuk memastikan terkait implementasi dari usulan-usulan tersebut dapat dilaksanakan.

Dokumentasi

